



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1970/GTF.03/13/04/2024

17 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2024

Yth. Inspektur Jenderal/Inspektur/Direktur Kepatuhan/Ketua UPG
Terlampir
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Nomor: B/1093/GTF.03/10-13/02/2023 Tanggal 27 Februari 2023 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2023 serta dalam rangka implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal/Inspektur/Direktur Kepatuhan/Ketua UPG bertanggung jawab atas Implementasi PPG di instansi/korporasinya;
2. Pedoman Rencana Kerja Monitoring Evaluasi PPG Tahun 2024 kami sampaikan pada Lampiran 2;
3. Pengisian Rencana Kerja dan Data Realisasi dilakukan melalui akun UPG pada aplikasi GOL (Gratifikasi *Online*);
4. Pengisian Data Realisasi dilakukan per semester sesuai jadwal yang tercantum dalam Lampiran 3 dengan format pengisian yang tersedia pada aplikasi GOL serta format dokumen pendukung pada Lampiran 4;
5. Data yang disampaikan akan kami verifikasi dan validasi sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi Implementasi PPG Tahun 2024.

Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui *email*: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring

u.b.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Herda Helmijaya

Tembusan:

1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK
3. Yth. Inspektur KPK

Lampiran 1

Surat Nomor : B/1970/GTF.03/13/04/2024

Tanggal : 17 April 2024

Daftar Inspektur Jenderal/Inspektur//Direktur Kepatuhan/Ketua UPG

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
1.	Arsip Nasional Republik Indonesia	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
2.	Badan Bank Tanah	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
3.	Badan Informasi Geospasial	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
4.	Badan Keamanan Laut (Bakamla)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
5.	Badan Kepegawaian Negara	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
6.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
7.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
8.	Badan Narkotika Nasional	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
9.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
10.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
11.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
12.	Badan Pangan Nasional	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
13.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
14.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
15.	Badan Pemeriksa Keuangan	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
16.	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
17.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
18.	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
19.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
20.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
21.	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
22.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
23.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
24.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
25.	Badan Pusat Statistik	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
26.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
27.	Badan Riset Dan Inovasi Nasional	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
28.	Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
29.	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
30.	Badan Standardisasi Nasional	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
31.	Bank Indonesia	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
32.	Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
33.	Dewan Pers	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
34.	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
35.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
36.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
37.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas)	Lembaga	DKI Jakarta

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
	HAM)	Negara/Lembaga Lainnya	
38.	Komisi Pemilihan Umum	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
39.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
40.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
41.	Komisi Yudisial	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
42.	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
43.	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
44.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
45.	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
46.	Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
47.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
48.	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
49.	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
50.	Mahkamah Agung	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
51.	Mahkamah Konstitusi	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
52.	Ombudsman Republik Indonesia	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
53.	Otorita Ibu Kota Nusantara	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	Kalimantan Timur
54.	Otoritas Jasa Keuangan	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
55.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
56.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Lembaga Negara/Lembaga	DKI Jakarta

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
		Lainnya	
57.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
58.	Sekretariat Kabinet	Lembaga Negara/Lembaga Lainnya	DKI Jakarta
59.	Kementerian Agama	Kementerian	DKI Jakarta
60.	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian	DKI Jakarta
61.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian	DKI Jakarta
62.	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian	DKI Jakarta
63.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian	DKI Jakarta
64.	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Kementerian	DKI Jakarta
65.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian	DKI Jakarta
66.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	kementerian	DKI Jakarta
67.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian	DKI Jakarta
68.	Kementerian Kesehatan	Kementerian	DKI Jakarta
69.	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian	DKI Jakarta
70.	Kementerian Keuangan	Kementerian	DKI Jakarta
71.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian	DKI Jakarta
72.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian	DKI Jakarta
73.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian	DKI Jakarta
74.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian	DKI Jakarta
75.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kementerian	DKI Jakarta
76.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian	DKI Jakarta
77.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian	DKI Jakarta
78.	Kementerian Luar Negeri	Kementerian	DKI Jakarta
79.	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian	DKI Jakarta
80.	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kementerian	DKI Jakarta
81.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian	DKI Jakarta
82.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian	DKI Jakarta
83.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian	DKI Jakarta
84.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian	DKI Jakarta
85.	Kementerian Perdagangan	Kementerian	DKI Jakarta
86.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian	DKI Jakarta
87.	Kementerian Perhubungan	Kementerian	DKI Jakarta
88.	Kementerian Perindustrian	Kementerian	DKI Jakarta

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
89.	Kementerian Pertahanan	Kementerian	DKI Jakarta
90.	Kementerian Pertanian	Kementerian	DKI Jakarta
91.	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian	DKI Jakarta
92.	Kementerian Sosial	Kementerian	DKI Jakarta
93.	Pemerintah Provinsi Aceh	Pemerintah Provinsi	Aceh
94.	Pemerintah Kota Banda Aceh	Pemerintah Kota	Aceh
95.	Pemerintah Kota Langsa	Pemerintah Kota	Aceh
96.	Pemerintah Kota Lhokseumawe	Pemerintah Kota	Aceh
97.	Pemerintah Kota Sabang	Pemerintah Kota	Aceh
98.	Pemerintah Kota Subulussalam	Pemerintah Kota	Aceh
99.	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	Pemerintah Kabupaten	Aceh
100.	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	Pemerintah Kabupaten	Aceh
101.	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	Pemerintah Kabupaten	Aceh
102.	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	Pemerintah Kabupaten	Aceh
103.	Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	Pemerintah Kabupaten	Aceh
104.	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Pemerintah Kabupaten	Aceh
105.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Pemerintah Kabupaten	Aceh
106.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	Pemerintah Kabupaten	Aceh
107.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	Pemerintah Kabupaten	Aceh
108.	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Pemerintah Kabupaten	Aceh
109.	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	Pemerintah Kabupaten	Aceh
110.	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	Pemerintah Kabupaten	Aceh
111.	Pemerintah Kabupaten Bireuen	Pemerintah Kabupaten	Aceh
112.	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	Pemerintah Kabupaten	Aceh
113.	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	Pemerintah Kabupaten	Aceh
114.	Pemerintah Kabupaten Pidie	Pemerintah Kabupaten	Aceh
115.	Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	Pemerintah Kabupaten	Aceh
116.	Pemerintah Kabupaten Simeulue	Pemerintah Kabupaten	Aceh
117.	Pemerintah Provinsi Bali	Pemerintah Provinsi	Bali
118.	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota	Bali
119.	Pemerintah Kabupaten Badung	Pemerintah Kabupaten	Bali
120.	Pemerintah Kabupaten Bangli	Pemerintah Kabupaten	Bali
121.	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Pemerintah Kabupaten	Bali
122.	Pemerintah Kabupaten Gianyar	Pemerintah Kabupaten	Bali
123.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	Pemerintah Kabupaten	Bali
124.	Pemerintah Kabupaten Karangasem	Pemerintah Kabupaten	Bali
125.	Pemerintah Kabupaten Klungkung	Pemerintah Kabupaten	Bali
126.	Pemerintah Kabupaten Tabanan	Pemerintah Kabupaten	Bali
127.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi	Bangka Belitung
128.	Pemerintah Kota Pangkalpinang	Pemerintah Kota	Bangka Belitung
129.	Pemerintah Kabupaten Bangka	Pemerintah Kabupaten	Bangka Belitung
130.	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	Pemerintah Kabupaten	Bangka Belitung
131.	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	Pemerintah Kabupaten	Bangka Belitung
132.	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Pemerintah Kabupaten	Bangka Belitung

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
133.	Pemerintah Kabupaten Belitung	Pemerintah Kabupaten	Bangka Belitung
134.	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Pemerintah Kabupaten	Bangka Belitung
135.	Pemerintah Provinsi Banten	Pemerintah Provinsi	Banten
136.	Pemerintah Kota Cilegon	Pemerintah Kota	Banten
137.	Pemerintah Kota Serang	Pemerintah Kota	Banten
138.	Pemerintah Kota Tangerang	Pemerintah Kota	Banten
139.	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Pemerintah Kota	Banten
140.	Pemerintah Kabupaten Lebak	Pemerintah Kabupaten	Banten
141.	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Pemerintah Kabupaten	Banten
142.	Pemerintah Kabupaten Serang	Pemerintah Kabupaten	Banten
143.	Pemerintah Kabupaten Tangerang	Pemerintah Kabupaten	Banten
144.	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pemerintah Provinsi	Bengkulu
145.	Pemerintah Kota Bengkulu	Pemerintah Kota	Bengkulu
146.	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu
147.	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu
148.	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu
149.	Pemerintah Kabupaten Kaur	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu
150.	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu
151.	Pemerintah Kabupaten Lebong	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu
152.	Pemerintah Kabupaten MukoMuko	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu
153.	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu
154.	Pemerintah Kabupaten Seluma	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu
155.	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta	Pemerintah Provinsi	DI Yogyakarta
156.	Pemerintah Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota	DI Yogyakarta
157.	Pemerintah Kabupaten Bantul	Pemerintah Kabupaten	DI Yogyakarta
158.	Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	Pemerintah Kabupaten	DI Yogyakarta
159.	Pemerintah Kabupaten Kulonprogo	Pemerintah Kabupaten	DI Yogyakarta
160.	Pemerintah Kabupaten Sleman	Pemerintah Kabupaten	DI Yogyakarta
161.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi	DKI Jakarta
162.	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Pemerintah Provinsi	Gorontalo
163.	Pemerintah Kota Gorontalo	Pemerintah Kota	Gorontalo
164.	Pemerintah Kabupaten Boalemo	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo
165.	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo
166.	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo
167.	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo
168.	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo
169.	Pemerintah Provinsi Jambi	Pemerintah Provinsi	Jambi
170.	Pemerintah Kota Jambi	Pemerintah Kota	Jambi
171.	Pemerintah Kota Sungai Penuh	Pemerintah Kota	Jambi
172.	Pemerintah Kabupaten Batang Hari	Pemerintah Kabupaten	Jambi
173.	Pemerintah Kabupaten Bungo	Pemerintah Kabupaten	Jambi
174.	Pemerintah Kabupaten Kerinci	Pemerintah Kabupaten	Jambi
175.	Pemerintah Kabupaten Merangin	Pemerintah Kabupaten	Jambi
176.	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	Pemerintah Kabupaten	Jambi
177.	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	Pemerintah Kabupaten	Jambi

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
178.	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pemerintah Kabupaten	Jambi
179.	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pemerintah Kabupaten	Jambi
180.	Pemerintah Kabupaten Tebo	Pemerintah Kabupaten	Jambi
181.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi	Jawa Barat
182.	Pemerintah Kota Bandung	Pemerintah Kota	Jawa Barat
183.	Pemerintah Kota Banjar	Pemerintah Kota	Jawa Barat
184.	Pemerintah Kota Bekasi	Pemerintah Kota	Jawa Barat
185.	Pemerintah Kota Bogor	Pemerintah Kota	Jawa Barat
186.	Pemerintah Kota Cimahi	Pemerintah Kota	Jawa Barat
187.	Pemerintah Kota Cirebon	Pemerintah Kota	Jawa Barat
188.	Pemerintah Kota Depok	Pemerintah Kota	Jawa Barat
189.	Pemerintah Kota Sukabumi	Pemerintah Kota	Jawa Barat
190.	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pemerintah Kota	Jawa Barat
191.	Pemerintah Kabupaten Bandung	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
192.	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
193.	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
194.	Pemerintah Kabupaten Bogor	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
195.	Pemerintah Kabupaten Ciamis	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
196.	Pemerintah Kabupaten Cianjur	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
197.	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
198.	Pemerintah Kabupaten Garut	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
199.	Pemerintah Kabupaten Indramayu	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
200.	Pemerintah Kabupaten Karawang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
201.	Pemerintah Kabupaten Kuningan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
202.	Pemerintah Kabupaten Majalengka	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
203.	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
204.	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
205.	Pemerintah Kabupaten Subang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
206.	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
207.	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
208.	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
209.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi	Jawa Tengah
210.	Pemerintah Kota Magelang	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
211.	Pemerintah Kota Pekalongan	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
212.	Pemerintah Kota Salatiga	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
213.	Pemerintah Kota Semarang	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
214.	Pemerintah Kota Surakarta	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
215.	Pemerintah Kota Tegal	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
216.	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
217.	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
218.	Pemerintah Kabupaten Batang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
219.	Pemerintah Kabupaten Blora	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
220.	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
221.	Pemerintah Kabupaten Brebes	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
222.	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
223.	Pemerintah Kabupaten Demak	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
224.	Pemerintah Kabupaten Grobogan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
225.	Pemerintah Kabupaten Jepara	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
226.	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
227.	Pemerintah Kabupaten Kebumen	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
228.	Pemerintah Kabupaten Kendal	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
229.	Pemerintah Kabupaten Klaten	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
230.	Pemerintah Kabupaten Kudus	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
231.	Pemerintah Kabupaten Magelang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
232.	Pemerintah Kabupaten Pati	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
233.	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
234.	Pemerintah Kabupaten Pemalang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
235.	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
236.	Pemerintah Kabupaten Purworejo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
237.	Pemerintah Kabupaten Rembang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
238.	Pemerintah Kabupaten Semarang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
239.	Pemerintah Kabupaten Sragen	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
240.	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
241.	Pemerintah Kabupaten Tegal	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
242.	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
243.	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
244.	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
245.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi	Jawa Timur
246.	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota	Jawa Timur
247.	Pemerintah Kota Blitar	Pemerintah Kota	Jawa Timur
248.	Pemerintah Kota Kediri	Pemerintah Kota	Jawa Timur
249.	Pemerintah Kota Madiun	Pemerintah Kota	Jawa Timur
250.	Pemerintah Kota Malang	Pemerintah Kota	Jawa Timur
251.	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota	Jawa Timur
252.	Pemerintah Kota Pasuruan	Pemerintah Kota	Jawa Timur
253.	Pemerintah Kota Probolinggo	Pemerintah Kota	Jawa Timur
254.	Pemerintah Kota Surabaya	Pemerintah Kota	Jawa Timur
255.	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
256.	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
257.	Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
258.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
259.	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
260.	Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
261.	Pemerintah Kabupaten Jember	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
262.	Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
263.	Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
264.	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
265.	Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
266.	Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
267.	Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
268.	Pemerintah Kabupaten Malang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
269.	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
270.	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
271.	Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
272.	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
273.	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
274.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
275.	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
276.	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
277.	Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
278.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
279.	Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
280.	Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
281.	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
282.	Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
283.	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
284.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Barat
285.	Pemerintah Kota Pontianak	Pemerintah Kota	Kalimantan Barat
286.	Pemerintah Kota Singkawang	Pemerintah Kota	Kalimantan Barat
287.	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
288.	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
289.	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
290.	Pemerintah Kabupaten Ketapang	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
291.	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
292.	Pemerintah Kabupaten Landak	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
293.	Pemerintah Kabupaten Melawi	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
294.	Pemerintah Kabupaten Mempawah	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
295.	Pemerintah Kabupaten Sambas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
296.	Pemerintah Kabupaten Sanggau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
297.	Pemerintah Kabupaten Sekadau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
298.	Pemerintah Kabupaten Sintang	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
299.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Selatan
300.	Pemerintah Kota Banjarbaru	Pemerintah Kota	Kalimantan Selatan
301.	Pemerintah Kota Banjarmasin	Pemerintah Kota	Kalimantan Selatan
302.	Pemerintah Kabupaten Balangan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
303.	Pemerintah Kabupaten Banjar	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
304.	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
305.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
306.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
307.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
308.	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
309.	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
310.	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
311.	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
312.	Pemerintah Kabupaten Tapin	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
313.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Tengah
314.	Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota	Kalimantan Tengah
315.	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
316.	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
317.	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
318.	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
319.	Pemerintah Kabupaten Kapuas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
320.	Pemerintah Kabupaten Katingan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
321.	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
322.	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
323.	Pemerintah Kabupaten Lamandau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
324.	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
325.	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
326.	Pemerintah Kabupaten Seruyan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
327.	Pemerintah Kabupaten Sukamara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
328.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur
329.	Pemerintah Kota Balikpapan	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur
330.	Pemerintah Kota Bontang	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur
331.	Pemerintah Kota Samarinda	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur
332.	Pemerintah Kabupaten Berau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur
333.	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur
334.	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur
335.	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur
336.	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur
337.	Pemerintah Kabupaten Paser	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur
338.	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur
339.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Utara
340.	Pemerintah Kota Tarakan	Pemerintah Kota	Kalimantan Utara
341.	Pemerintah Kabupaten Bulungan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara
342.	Pemerintah Kabupaten Malinau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara
343.	Pemerintah Kabupaten Nunukan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara
344.	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara
345.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pemerintah Provinsi	Kepulauan Riau
346.	Pemerintah Kota Batam	Pemerintah Kota	Kepulauan Riau
347.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	Pemerintah Kota	Kepulauan Riau
348.	Pemerintah Kabupaten Bintan	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Riau
349.	Pemerintah Kabupaten Karimun	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Riau
350.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Riau
351.	Pemerintah Kabupaten Lingga	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Riau
352.	Pemerintah Kabupaten Natuna	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Riau
353.	Pemerintah Provinsi Lampung	Pemerintah Provinsi	Lampung
354.	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Pemerintah Kota	Lampung
355.	Pemerintah Kota Metro	Pemerintah Kota	Lampung
356.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung
357.	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Pemerintah Kabupaten	Lampung

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
358.	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Pemerintah Kabupaten	Lampung
359.	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	Pemerintah Kabupaten	Lampung
360.	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	Pemerintah Kabupaten	Lampung
361.	Pemerintah Kabupaten Mesuji	Pemerintah Kabupaten	Lampung
362.	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	Pemerintah Kabupaten	Lampung
363.	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung
364.	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Pemerintah Kabupaten	Lampung
365.	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	Pemerintah Kabupaten	Lampung
366.	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	Pemerintah Kabupaten	Lampung
367.	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung
368.	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	Pemerintah Kabupaten	Lampung
369.	Pemerintah Provinsi Maluku	Pemerintah Provinsi	Maluku
370.	Pemerintah Kota Ambon	Pemerintah Kota	Maluku
371.	Pemerintah Kota Tual	Pemerintah Kota	Maluku
372.	Pemerintah Kabupaten Buru	Pemerintah Kabupaten	Maluku
373.	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	Pemerintah Kabupaten	Maluku
374.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Pemerintah Kabupaten	Maluku
375.	Pemerintah Kabupaten Tanimbar	Pemerintah Kabupaten	Maluku
376.	Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya	Pemerintah Kabupaten	Maluku
377.	Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	Pemerintah Kabupaten	Maluku
378.	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	Pemerintah Kabupaten	Maluku
379.	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Pemerintah Kabupaten	Maluku
380.	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	Pemerintah Kabupaten	Maluku
381.	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	Pemerintah Kabupaten	Maluku
382.	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Pemerintah Provinsi	Maluku Utara
383.	Pemerintah Kota Ternate	Pemerintah Kota	Maluku Utara
384.	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	Pemerintah Kota	Maluku Utara
385.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara
386.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara
387.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara
388.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara
389.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara
390.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara
391.	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara
392.	Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara
393.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Barat
394.	Pemerintah Kota Bima	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Barat
395.	Pemerintah Kota Mataram	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Barat
396.	Pemerintah Kabupaten Bima	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
397.	Pemerintah Kabupaten Dompu	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
398.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
399.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
400.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
401.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
402.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
403.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
404.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Timur
405.	Pemerintah Kota Kupang	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Timur
406.	Pemerintah Kabupaten Alor	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
407.	Pemerintah Kabupaten Belu	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
408.	Pemerintah Kabupaten Ende	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
409.	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
410.	Pemerintah Kabupaten Kupang	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
411.	Pemerintah Kabupaten Lembata	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
412.	Pemerintah Kabupaten Malaka	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
413.	Pemerintah Kabupaten Manggarai	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
414.	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
415.	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
416.	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
417.	Pemerintah Kabupaten Ngada	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
418.	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
419.	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
420.	Pemerintah Kabupaten Sikka	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
421.	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
422.	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
423.	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
424.	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
425.	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
426.	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
427.	Pemerintah Provinsi Papua	Pemerintah Provinsi	Papua
428.	Pemerintah Kota Jayapura	Pemerintah Kota	Papua
429.	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	Pemerintah Kabupaten	Papua
430.	Pemerintah Kabupaten Jayapura	Pemerintah Kabupaten	Papua
431.	Pemerintah Kabupaten Keerom	Pemerintah Kabupaten	Papua
432.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen	Pemerintah Kabupaten	Papua
433.	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya	Pemerintah Kabupaten	Papua
434.	Pemerintah Kabupaten Sarmi	Pemerintah Kabupaten	Papua
435.	Pemerintah Kabupaten Supiori	Pemerintah Kabupaten	Papua
436.	Pemerintah Kabupaten Waropen	Pemerintah Kabupaten	Papua
437.	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Pemerintah Provinsi	Papua Barat
438.	Pemerintah Kabupaten Fak Fak	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat
439.	Pemerintah Kabupaten Kaimana	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat
440.	Pemerintah Kabupaten Manokwari	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat
441.	Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat
442.	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat
443.	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat
444.	Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat
445.	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Provinsi	Papua Barat Daya
446.	Pemerintah Kota Sorong	Pemerintah Kota	Papua Barat Daya

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
447.	Pemerintah Kabupaten Maybrat	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat Daya
448.	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat Daya
449.	Pemerintah Kabupaten Sorong	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat Daya
450.	Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat Daya
451.	Pemerintah Kabupaten Tambrau	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat Daya
452.	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	Pemerintah Provinsi	Papua Pegunungan
453.	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	Pemerintah Kabupaten	Papua Pegunungan
454.	Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya	Pemerintah Kabupaten	Papua Pegunungan
455.	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten	Papua Pegunungan
456.	Pemerintah Kabupaten Nduga	Pemerintah Kabupaten	Papua Pegunungan
457.	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	Pemerintah Kabupaten	Papua Pegunungan
458.	Pemerintah Kabupaten Tolikara	Pemerintah Kabupaten	Papua Pegunungan
459.	Pemerintah Kabupaten Yahukimo	Pemerintah Kabupaten	Papua Pegunungan
460.	Pemerintah Kabupaten Yalimo	Pemerintah Kabupaten	Papua Pegunungan
461.	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	Pemerintah Provinsi	Papua Selatan
462.	Pemerintah Kabupaten Asmat	Pemerintah Kabupaten	Papua Selatan
463.	Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	Pemerintah Kabupaten	Papua Selatan
464.	Pemerintah Kabupaten Mappi	Pemerintah Kabupaten	Papua Selatan
465.	Pemerintah Kabupaten Merauke	Pemerintah Kabupaten	Papua Selatan
466.	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	Pemerintah Provinsi	Papua Tengah
467.	Pemerintah Kabupaten Deiyai	Pemerintah Kabupaten	Papua Tengah
468.	Pemerintah Kabupaten Dogiyai	Pemerintah Kabupaten	Papua Tengah
469.	Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	Pemerintah Kabupaten	Papua Tengah
470.	Pemerintah Kabupaten Mimika	Pemerintah Kabupaten	Papua Tengah
471.	Pemerintah Kabupaten Nabire	Pemerintah Kabupaten	Papua Tengah
472.	Pemerintah Kabupaten Paniai	Pemerintah Kabupaten	Papua Tengah
473.	Pemerintah Kabupaten Puncak	Pemerintah Kabupaten	Papua Tengah
474.	Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	Pemerintah Kabupaten	Papua Tengah
475.	Pemerintah Provinsi Riau	Pemerintah Provinsi	Riau
476.	Pemerintah Kota Dumai	Pemerintah Kota	Riau
477.	Pemerintah Kota Pekanbaru	Pemerintah Kota	Riau
478.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Pemerintah Kabupaten	Riau
479.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Pemerintah Kabupaten	Riau
480.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	Pemerintah Kabupaten	Riau
481.	Pemerintah Kabupaten Kampar	Pemerintah Kabupaten	Riau
482.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Pemerintah Kabupaten	Riau
483.	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	Pemerintah Kabupaten	Riau
484.	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	Pemerintah Kabupaten	Riau
485.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	Pemerintah Kabupaten	Riau
486.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	Pemerintah Kabupaten	Riau
487.	Pemerintah Kabupaten Siak	Pemerintah Kabupaten	Riau
488.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Barat
489.	Pemerintah Kabupaten Majene	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat
490.	Pemerintah Kabupaten Mamasa	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat
491.	Pemerintah Kabupaten Mamuju	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
492.	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat
493.	Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat
494.	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat
495.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Selatan
496.	Pemerintah Kota Makassar	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan
497.	Pemerintah Kota Palopo	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan
498.	Pemerintah Kota Parepare	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan
499.	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
500.	Pemerintah Kabupaten Barru	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
501.	Pemerintah Kabupaten Bone	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
502.	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
503.	Pemerintah Kabupaten Enrekang	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
504.	Pemerintah Kabupaten Gowa	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
505.	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
506.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
507.	Pemerintah Kabupaten Luwu	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
508.	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
509.	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
510.	Pemerintah Kabupaten Maros	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
511.	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
512.	Pemerintah Kabupaten Pinrang	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
513.	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
514.	Pemerintah Kabupaten Sinjai	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
515.	Pemerintah Kabupaten Soppeng	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
516.	Pemerintah Kabupaten Takalar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
517.	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
518.	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
519.	Pemerintah Kabupaten Wajo	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
520.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tengah
521.	Pemerintah Kota Palu	Pemerintah Kota	Sulawesi Tengah
522.	Pemerintah Kabupaten Banggai	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
523.	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
524.	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
525.	Pemerintah Kabupaten Buol	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
526.	Pemerintah Kabupaten Donggala	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
527.	Pemerintah Kabupaten Morowali	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
528.	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
529.	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
530.	Pemerintah Kabupaten Poso	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
531.	Pemerintah Kabupaten Sigi	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
532.	Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
533.	Pemerintah Kabupaten Toli Toli	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
534.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tenggara
535.	Pemerintah Kota Bau Bau	Pemerintah Kota	Sulawesi Tenggara

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
536.	Pemerintah Kota Kendari	Pemerintah Kota	Sulawesi Tenggara
537.	Pemerintah Kabupaten Bombana	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
538.	Pemerintah Kabupaten Buton	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
539.	Pemerintah Kabupaten Buton Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
540.	Pemerintah Kabupaten Buton Tengah	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
541.	Pemerintah Kabupaten Buton Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
542.	Pemerintah Kabupaten Kolaka	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
543.	Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
544.	Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
545.	Pemerintah Kabupaten Konawe	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
546.	Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
547.	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
548.	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
549.	Pemerintah Kabupaten Muna	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
550.	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
551.	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
552.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Utara
553.	Pemerintah Kota Bitung	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara
554.	Pemerintah Kota Kotamobagu	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara
555.	Pemerintah Kota Manado	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara
556.	Pemerintah Kota Tomohon	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara
557.	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
558.	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
559.	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
560.	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
561.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
562.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
563.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
564.	Pemerintah Kabupaten Minahasa	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
565.	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
566.	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
567.	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
568.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi	Sumatera Barat
569.	Pemerintah Kota Bukittinggi	Pemerintah Kota	Sumatera Barat
570.	Pemerintah Kota Padang	Pemerintah Kota	Sumatera Barat
571.	Pemerintah Kota Padang Panjang	Pemerintah Kota	Sumatera Barat
572.	Pemerintah Kota Pariaman	Pemerintah Kota	Sumatera Barat
573.	Pemerintah Kota Payakumbuh	Pemerintah Kota	Sumatera Barat
574.	Pemerintah Kota Sawahlunto	Pemerintah Kota	Sumatera Barat
575.	Pemerintah Kota Solok	Pemerintah Kota	Sumatera Barat
576.	Pemerintah Kabupaten Agam	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
577.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
578.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
579.	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
580.	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
581.	Pemerintah Kabupaten Pasaman	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
582.	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
583.	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
584.	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
585.	Pemerintah Kabupaten Solok	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
586.	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
587.	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
588.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan
589.	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan
590.	Pemerintah Kota Pagar Alam	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan
591.	Pemerintah Kota Palembang	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan
592.	Pemerintah Kota Prabumulih	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan
593.	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
594.	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
595.	Pemerintah Kabupaten Lahat	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
596.	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
597.	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
598.	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
599.	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
600.	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
601.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
602.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
603.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
604.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
605.	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
606.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pemerintah Provinsi	Sumatera Utara
607.	Pemerintah Kota Binjai	Pemerintah Kota	Sumatera Utara
608.	Pemerintah Kota Gunungsitoli	Pemerintah Kota	Sumatera Utara
609.	Pemerintah Kota Medan	Pemerintah Kota	Sumatera Utara
610.	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	Pemerintah Kota	Sumatera Utara
611.	Pemerintah Kota Pematang Siantar	Pemerintah Kota	Sumatera Utara
612.	Pemerintah Kota Sibolga	Pemerintah Kota	Sumatera Utara
613.	Pemerintah Kota Tanjung Balai	Pemerintah Kota	Sumatera Utara
614.	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Pemerintah Kota	Sumatera Utara
615.	Pemerintah Kabupaten Asahan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
616.	Pemerintah Kabupaten Batu Bara	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
617.	Pemerintah Kabupaten Dairi	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
618.	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
619.	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
620.	Pemerintah Kabupaten Karo	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
621.	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
622.	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
623.	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
624.	Pemerintah Kabupaten Langkat	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
625.	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
626.	Pemerintah Kabupaten Nias	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
627.	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
628.	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
629.	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
630.	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
631.	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
632.	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
633.	Pemerintah Kabupaten Samosir	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
634.	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
635.	Pemerintah Kabupaten Simalungun	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
636.	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
637.	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
638.	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
639.	Pemerintah Kabupaten Toba	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
640.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	BUMN	DKI Jakarta
641.	Perum Bulog	BUMN	DKI Jakarta
642.	Perum DAMRI	BUMN	DKI Jakarta
643.	Perum Jasa Tirta I	BUMN	DKI Jakarta
644.	Perum Jasa Tirta II	BUMN	DKI Jakarta
645.	Perum Kehutanan Negara (Perhutani)	BUMN	DKI Jakarta
646.	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA	BUMN	DKI Jakarta
647.	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV)	BUMN	Banten
648.	Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)	BUMN	DKI Jakarta
649.	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)	BUMN	DKI Jakarta
650.	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)	BUMN	DKI Jakarta
651.	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)	BUMN	DKI Jakarta
652.	Perum Perikanan Indonesia	BUMN	DKI Jakarta
653.	Perum Produksi Film Negara (PFN)	BUMN	DKI Jakarta
654.	PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	BUMN	DKI Jakarta
655.	PT Amarta Karya (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
656.	PT Angkasa Pura I (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
657.	PT Angkasa Pura II (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
658.	PT Asabri (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
659.	PT Asdp Indonesia Ferry (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
660.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
661.	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
662.	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
663.	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	BUMN	DKI Jakarta

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
	(Persero)		
664.	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	BUMN	DKI Jakarta
665.	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	BUMN	DKI Jakarta
666.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	BUMN	DKI Jakarta
667.	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	BUMN	DKI Jakarta
668.	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	BUMN	DKI Jakarta
669.	PT Barata Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
670.	PT Berdikari (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
671.	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
672.	PT Bina Karya (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
673.	PT Bio Farma (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
674.	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
675.	PT Boma Bisma Indra (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
676.	PT Brantas Abipraya (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
677.	PT Dahana (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
678.	PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri / Taspen (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
679.	PT Danareksa (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
680.	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
681.	PT Djakarta Lloyd (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
682.	PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
683.	PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	BUMN	Jawa Timur
684.	PT Energi Management Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
685.	PT Garam	BUMN	DKI Jakarta
686.	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk	BUMN	DKI Jakarta
687.	PT Geodipa Energi	BUMN	DKI Jakarta
688.	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
689.	PT Hutama Karya (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
690.	PT Indah Karya (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
691.	PT Indofarma (Persero), TBK.	BUMN	Jawa Barat
692.	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
693.	PT Indra Karya (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
694.	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
695.	PT Industri Kereta Api (Persero) (INKA)	BUMN	Jawa Timur
696.	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
697.	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
698.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	BUMN	DKI Jakarta
699.	PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)	BUMN	DKI Jakarta
700.	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.	BUMN	DKI Jakarta
701.	PT Jasa Raharja (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
702.	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
703.	PT Kawasan Industri Lampung	BUMN	DKI Jakarta
704.	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
705.	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	BUMN	DKI Jakarta

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
706.	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
707.	PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI)	BUMN	Jawa Barat
708.	PT Kimia Farma (Persero), TBK	BUMN	DKI Jakarta
709.	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
710.	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	BUMN	DKI Jakarta
711.	PT Len Industri (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
712.	PT Nindya Karya (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
713.	PT PAL Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
714.	PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
715.	PT Pegadaian (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
716.	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
717.	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Pelni)	BUMN	DKI Jakarta
718.	PT Pembangunan Perumahan (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
719.	PT Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
720.	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
721.	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
722.	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
723.	PT Perikanan Nusantara (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
724.	PT Perkebunan Nusantara Holding (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
725.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
726.	PT Pertamina (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
727.	PT Pertani (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
728.	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	BUMN	DKI Jakarta
729.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
730.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
731.	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	BUMN	DKI Jakarta
732.	PT Pindad (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
733.	PT Pos Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
734.	PT Primissima (Persero)	BUMN	Jawa Tengah
735.	PT Pupuk Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
736.	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
737.	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
738.	PT Sang Hyang Seri (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
739.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI)	BUMN	DKI Jakarta
740.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
741.	PT Sarinah (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
742.	PT Semen Baturaja (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
743.	PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.	BUMN	DKI Jakarta
744.	PT Semen Kupang (Persero)	BUMN	Nusa Tenggara Timur
745.	PT Sucofindo	BUMN	DKI Jakarta
746.	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	BUMN	DKI Jakarta
747.	PT Survai Udara Penas (Persero)	BUMN	DKI Jakarta

No	Instansi	Jenis Instansi	Wilayah
748.	PT Surveyor Indonesia (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
749.	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Dan Ratu Boko (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
750.	PT Telkom Indonesia, Tbk	BUMN	Jawa Barat
751.	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
752.	PT Virama Karya (Persero)	BUMN	DKI Jakarta
753.	PT Waskita Karya (Persero), Tbk.	BUMN	DKI Jakarta
754.	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	BUMN	DKI Jakarta
755.	PT Yodya Karya (Persero)	BUMN	DKI Jakarta

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring

u.b.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Komisi Pemberantasan Korupsi,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Herda Helmijaya

Lampiran 2

Surat Nomor : B/1970/GTF.03/13/04/2024

Tanggal : 17 April 2024

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

***Catatan: Monitoring dan evaluasi realisasi implementasi PPG bersifat self-assessment dengan mengisi dan mengunggah bukti pelaksanaan kegiatan pada aplikasi Gratifikasi Online (GOL)**

No	Komponen	Bobot	Keterangan	Dokumen kelengkapan	
Perangkat Pengendalian Gratifikasi (10%)				Penjelasan	
1	Perangkat Pengendalian Gratifikasi	100%	<ul style="list-style-type: none">- Aturan mengenai Pengendalian Gratifikasi- Penetapan/SK atau dokumen lainnya yang menunjukkan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Peraturan/Kebijakan/Pedoman atau dokumen lainnya terkait Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Instansi	<ul style="list-style-type: none">- Menyesuaikan dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi yang disertai dengan tanda tangan pimpinan sebagai bentuk komitmen.- Nilai maksimal instansi apabila memiliki dan mengunggah aturan terbaru dan dokumen fungsi UPG yang ditandatangani oleh pimpinan.

Implementasi Pemanfaatan Media (20%)					Penjelasan
2	Penyebaran pesan pengendalian gratifikasi	50%	<p>Penyebaran pesan melalui media (sasaran internal).</p> <p>Mohon mendokumentasikan lokasi/titik/posisi penyebarannya.</p>	<p>Konten disebarakan pada lingkungan kantor, ruangan kerja, ruang layanan publik, media elektronik/non elektronik, perangkat kerja, dan lingkungan K/L/PD dan BUMN/BUMD.</p> <p>Contoh materi: teladan pimpinan, upaya instansi dalam pengendalian gratifikasi, pengenalan gratifikasi, pelaporan gratifikasi, tata cara lapor, sanksi gratifikasi (di lingkungan instansi maupun sanksi pidana), manfaat laporan gratifikasi</p>	<p>Beberapa contoh di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan banner/poster/spanduk/flyer/stiker - Penyebaran surat edaran/surat imbauan - Penyebaran melalui WA blast - Pemasangan <i>screensaver</i> pada komputer (tampilan pengguna saat mengistirahatkan komputer) - Pemasangan <i>pop up</i> aplikasi internal Pegawai - Penyebaran pesan melalui <i>broadcast email</i> pegawai - Penayangan tv internal - Pemberitaan upaya pengendalian gratifikasi di media lokal/nasional - Penyebaran konten melalui Instagram, Facebook, website pemerintah daerah, website layanan publik - Penayangan video pada tv layanan, podcast/talkshow radio, penayangan videotron <p>(Tautan referensi materi dan konten terlampir)</p>
		50%	<p>Penyebaran pesan melalui media (sasaran eksternal).</p> <p>Mohon mendokumentasikan lokasi/titik/posisi penyebarannya.</p>	<p>Konten disebarakan pada ruang layanan publik, media elektronik/non elektronik, yang ditujukan bagi pengguna layanan, mitra kerja/rekanan, pelaku usaha dan masyarakat.</p> <p>Contoh materi: teladan pimpinan, upaya instansi dalam pengendalian gratifikasi, pengenalan gratifikasi, dampak gratifikasi</p>	

Implementasi Diseminasi Pengendalian Gratifikasi (20%)					Penjelasan
3	E-learning "Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"	40%	Mendorong pegawai yang belum pernah mengikuti <i>e-learning</i> gratifikasi untuk mendapat nilai sempurna di komponen ini tahun 2024	Sertifikat E-Learning Pengendalian Gratifikasi seluruh peserta	Untuk menjangkau lebih banyak peserta, UPG agar mengikutsertakan pegawai (outsourcer, pegawai baru, honorer) di OPD/satker/unit kerja yang memiliki risiko/rentan melalui pendaftaran <i>e-learning</i> secara kolektif oleh UPG yang disampaikan ke https://tinyurl.com/kelasgratifikasiKPK
4	Sosialisasi/Diseminasi Pengendalian Gratifikasi	30%	Sosialisasi/diseminasi kepada pihak internal (seluruh pegawai) di lingkungan instansi.	Pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk kegiatan <i>online/offline</i> . <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan (dibuktikan dengan narasumber/<i>keynote speaker</i>). - Diharapkan dilakukan di area/unit kerja yang memiliki risiko tinggi/rentan korupsi, di antaranya perizinan, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM. Bukti kegiatan: surat undangan, daftar peserta, laporan kegiatan, dokumentasi foto, materi paparan, dll. Untuk pemerintah daerah dapat menggunakan laporan pelaksanaan sosialisasi gratifikasi yang digunakan dalam pemenuhan komponen Kepatuhan Pengendalian Gratifikasi di aplikasi MCP Korsupgah.	Materi sosialisasi sekurang-kurangnya memuat tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Upaya pengendalian gratifikasi untuk memperbaiki persepsi dan menurunkan risiko korupsi (contoh: perbaikan SOP/prosedur layanan publik dapat disosialisasikan pada masyarakat) - Gratifikasi dan korupsi; - Sanksi gratifikasi (Pasal 12 B UU No. 31 Th 1999 jo. 20 Th 2021) dan sanksi di lingkungan instansi; - Aturan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan instansi masing-masing - Tata cara pelaporan gratifikasi dan peran UPG (Tautan referensi materi dan konten terlampir)
		30%	Sosialisasi/diseminasi kepada pihak eksternal (mitra kerja, pelaku usaha/rekanan, masyarakat)		

Pemetaan Titik Rawan (10%)					Penjelasan
5	Identifikasi titik rawan praktik gratifikasi	100%	Identifikasi risiko pada sektor pelayanan publik	Mengidentifikasi titik rawan gratifikasi dan/atau memahami risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas kewenangan/ <i>core business</i> yang mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal pada instansi. Kegiatan bertujuan untuk memastikan instansi memahami adanya risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas/ kewenangan pada instansi	<ul style="list-style-type: none"> - UPG agar merujuk pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) khususnya pada ranah yang memiliki skor gratifikasi rendah (khusus Pemda dan Kementerian/Lembaga) - Instansi harus memetakan area rawan yang berisiko tinggi atau sedang (esensial)
			Identifikasi risiko pada sektor pengadaan barang dan/atau jasa		
			Identifikasi risiko pada sektor pengelolaan Sumber Daya Manusia		
			Identifikasi risiko pada sektor perizinan		
			Identifikasi risiko pada kewenangan lainnya		
Mitigasi Risiko (10%)					Penjelasan
6	Mitigasi risiko	100%	Mitigasi risiko pada sektor pelayanan publik	Melakukan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan gratifikasi yang ada pada instansi dan melampirkan bukti pendukung upaya perbaikannya/tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi dalam rangka perbaikan komponen skor Survei Penilaian Integritas (SPI) khususnya pada ranah yang memiliki skor gratifikasi rendah (khusus Pemda dan Kementerian/Lembaga) - Instansi harus memetakan area rawan yang berisiko tinggi atau sedang (esensial)
			Mitigasi risiko pada sektor pengadaan barang dan/atau jasa		
			Mitigasi risiko pada sektor pengelolaan Sumber Daya Manusia		
			Mitigasi risiko pada sektor perizinan		
			Mitigasi risiko pada kewenangan lainnya		

Hasil Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (20%)					Penjelasan
7	Pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi	100%	Menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi meliputi laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL	Rekapitulasi laporan gratifikasi (baik yang dikelola UPG maupun yang disampaikan langsung ke KPK) *Memperhatikan ketepatan waktu penyampaian (dalam waktu 30 hari kerja)*	Nilai maksimal apabila melaporkan penerimaan gratifikasi kategori wajib lapor (penetapan Milik Negara) dalam tahun berjalan
Inovasi (10%)					Penjelasan
8	Inovasi pengendalian gratifikasi	100%	Menyampaikan inovasi pengendalian gratifikasi di lingkungan instansi yang memperhatikan identifikasi masalah, kebaruan/nilai tambah, strategi keberlanjutan, dampak dan keterlibatan pemangku kepentingan	Inovasi dalam pelaksanaan di bidang: <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sumber Daya Manusia; • Perizinan; • Pengadaan Barang dan Jasa; • Pelayanan Publik. 	Penyampaian/ <i>upload</i> Laporan Inovasi sebagaimana format pada Lampiran Dokumen Pendukung.
Dokumen Tambahan BUMN/BUMD					Penjelasan
9	Penerapan SMAP (khusus BUMN/BUMD)		Mendorong Badan Usaha/Korporasi (BUMN/D dan Anak Perusahaan BUMN/D) yang belum menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) (Rujukan: Panduan Cegah Korupsi yang dikeluarkan oleh KPK, dapat diakses melalui website Jaga.id)	Peraturan/Kebijakan/ Pedoman terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Contoh: PanCEK atau ISO, dll.	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti keikutsertaan Panduan Cegah Korupsi yang diunduh melalui website Jaga.id (untuk yang mengikuti PanCEK) - Dokumen SMAP lainnya

***Referensi yang dapat digunakan dalam implementasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi**

No.	Uraian	Sumber
1	Materi Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi (video pembelajaran, video iklan layanan masyarakat, konten bergambar, materi paparan)	https://gol.kpk.go.id/materi-sosialisasi/
2	E-learning Pengendalian Gratifikasi	informasi e-learning https://elearning.kpk.go.id/moodle/ pendaftaran di: https://tinyurl.com/kelasgratifikasiKPK
3	Instagram Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (Konten Publikasi)	https://www.instagram.com/literasigratifikasi/
4	TikTok Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (Konten Publikasi)	https://www.tiktok.com/literasigratifikasi/
5	Informasi Skor SPI (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah)	https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi
7	Informasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK)	https://jaga.id/kuisprofit
8	Materi Paparan Pengendalian Gratifikasi	https://gol.kpk.go.id/materi-sosialisasi/
9	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi - Surat Edaran Hari Raya - Surat Edaran Industri Jasa Keuangan (Fee Perbankan) - Surat Edaran Kementerian BUMN (PanCEK) 	https://gol.kpk.go.id/dokumen/
10	Frequently Asked Question Seputar Gratifikasi dan GOL (daftar pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya)	https://gol.kpk.go.id/faq/

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Herda Helmijaya

Lampiran 4

Surat Nomor : B/1970/GTF.03/13/04/2024

Tanggal : 17 April 2024

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

LAPORAN INOVASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2024

Judul Inovasi :

Aspek yang dinilai dan bobot	Pertanyaan	Jawaban (setiap pertanyaan wajib diisi)
Identifikasi Masalah, Latar Belakang dan Tujuan (25%)	Uraikan identifikasi masalah, latar belakang dan tujuan dari Inovasi, yang terdiri dari: ● Rumusan masalah yang dihadapi (kondisi nyata sebelum adanya inovasi antara lain kebutuhan/kepentingan publik yang tidak/belum/terhambat terpenuhi) terkait dengan gratifikasi ; ● Gagasan dari Inovasi; ● Tujuan dari Inovasi; ● Kelompok masyarakat atau populasi yang mendapatkan manfaat atau menjadi target Inovasi. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.	<i>Rumusan masalah yang dihadapi</i>
		<i>Gagasan dari Inovasi</i>
		<i>Tujuan dari Inovasi</i>
		<i>Kelompok masyarakat atau populasi yang mendapatkan manfaat atau menjadi target Inovasi</i>
Inovatif (Kebaruan, Nilai Tambah, atau Keunikan) (30%)	Jelaskan sisi kebaruan/keunikan, nilai tambah dan/atau keunggulan dari Inovasi ini di instansi Anda. Jelaskan apakah Inovasi ini merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain.	<i>Sisi Kebaruan/Keunikan/Keunggulan Inovasi</i>
		<i>Penjelasan apabila Inovasi merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain</i>
Strategi keberlanjutan (30%)	Jelaskan strategi apa saja yang telah dilakukan agar Inovasi tetap berlanjut.	<i>Strategi yang telah dilakukan agar Inovasi dapat tetap berlanjut</i>
		<i>Pihak – pihak yang terlibat dalam melaksanakan Inovasi</i>
Dokumentasi (15%)	Bukti pendukung pelaksanaan inovasi	<i>Dokumentasi atau kelengkapan pendukung lainnya</i>

REKAPITULASI PELAPORAN PENERIMAAN DAN/ATAU PENOLAKAN GRATIFIKASI YANG DIKELOLA OLEH UPG

Instansi : Nama Instansi

Waktu Monev : SemesterTahun 2024

*** Formulir ini hanya digunakan untuk Laporan gratifikasi yang tidak disampaikan ke KPK dan atau tidak diinput pada aplikasi Gratifikasi Online (GOL)**

No	Nama Pelapor	Jabatan	Tanggal Penerimaan/ Penolakan	Tanggal dilaporkan ke UPG	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan (Penerimaan/ Penolakan)	Objek Gratifikasi	Penetapan UPG	Pemanfaatan Objek Gratifikasi
1	Bapak A	Auditor	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	Auditee	Penolakan	Uang Tunai	Laporan dikelola UPG	Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi
2	Ibu B	Fungsional	0... Januari 2024	00 Januari 2024	Vendor	Penerimaan	Makanan	Laporan dikelola UPG	Disumbangkan ke Panti Asuhan
3	Bapak C	Kepala Dinas	0... Februari 2024	00 Maret 2024	Panitia acara	Penerimaan	Plakat	Laporan dikelola UPG	Dimanfaatkan oleh instansi (diletakkan pada lemari <i>display</i>)
	...								

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring

u.b.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Komisi Pemberantasan Korupsi,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Herda Helmijaya